

## PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK PEMBENTUKAN UPTD PERSAMPAHAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2022

Hendrik Vallen Ayomi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura  
Email : vvallen34@gmail.com

### ABSTRACT

*Waste is one of the complex problems faced by developing countries as well as in developed countries in the world. Presentation and discussion. BPPW) Papua Province presented material on the implementation of assistance at the center (covering the Kick Off Meeting, Consignment and Final Workshop, as well as a presentation on the implementation of assistance in the regions (covering Technical Meetings, FGDs and Regional Workshops). included in the Garbage UPTD Academic and Perkada study and Submission regarding the importance of forming the UPTD Even receiving the necessary input in the preparation of the Academic Study and Perkada Draft was also mutually agreed upon by each SKPD present at the Focus Group Discussion meeting on academic studies on the formation of the waste UPTD in Keerom Regency.*

**Keywords:** *Academic Studies, UPTD, Garbage*

### ABSTRAK

Sampah merupakan salah satu masalah yang kompleks dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju di dunia. Metode yang diterapkan untuk pencapaian maksud dan tujuan pada rapat Focus Group Discussion dalam kegiatan pendampingan Kelembagaan Penyusunan Kajian Akademik dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Persampahan Kabupaten Keerom ialah dengan Presentasi dan diskusi. BPPW) Provinsi Papua memaparkan materi tentang pelaksanaan pendampingan di pusat (meliputi Kick Off Meeting, Konsinyasi dan Workshop akhir, serta Pemaparan tentang pelaksanaan pendampingan di daerah (meliputi Technical Meeting, FGD dan Workshop Daerah) Dari Konsultan Daerah memaparkan materi tentang muatan-muatan yang dicamtumkan dalam kajian Akademis dan Perkada UPTD persampahan dan Penyampaian mengenai pentingnya pembentukan UPTD. Bahakn menerima daran masuk yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Akademis dan Rancangan Perkada juga disepakati bersama oleh setiap SKPD yang hadir pada saat rapat Focus Group Discussion mengenai kajian akademik pembentukan UPTD persampahan Kabupaten Keerom.

**Kata kunci:** Kajian Akademik, UPTD, Persampahan

### PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang kompleks dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju di dunia. Dalam UU No. 18 tahun 2008 pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena di berbagai negara pada belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan oleh masing-masing negara atau daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat mengelola sampah harus dilakukan prinsip 3-R Reduce(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang sampah).Permasalahan sampah mempunyai potensi dampak negatif yang akan mempengaruhi berbagai segi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain menjadi sumber bakteri penyakit, pencemaran lingkungan meliputi pencemaran udara, tanah dan air sampah yang menumpuk dan tak terkelola dengan baik kadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup disekitarnya, bahkan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 mengamanatkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses pelayanan persampahan menjadi 83%. Sejalan dengan amanat RPJMN tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Sanitasi berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur Persampahan di Kabupaten/Kota. Pasca pembangunan infrastruktur tersebut, perlu didukung dengan regulasi yang memadai, lembaga pengelola yang handal, dukungan pembiayaan dan peran serta masyarakat maupun pihak swasta. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengamanatkan bahwa persampahan merupakan salah satu substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan sebagai SPM. Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sampah dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua berupaya memberikan pendampingan terhadap Kabupaten Keerom dalam rangka Pendampingan Penyusunan pendampingan penyusunan Kajian Akademis dan Pembahasan Rancangan Perkada UPTD persampahan. Sehingga kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka keberfungsian infrastruktur sanitasi dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan rapat Focus Group Discussion merupakan tindak lanjut dari rapat Technical Meeting yang bertujuan untuk Pembahasan kosepawal kajian akademis dan Analisis Rasio Belanja Pegawai (ARB) dengan tim penyusun kajian Akademis dan pembahasan ranperkada UPTD.

Serta Penyampaian konsiyasi satu dengan pusat (Dirjen Sanitasi) yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik/ kajian akademik mengenai pentingnya UPTD persampahan agar terciptanya keberfungsian infrastruktur sanitasi yang baik. Kegiatan rapat Focus Group Discussion ini merupakan bentuk tahapan yang harus dilakukan guna untuk proses revisi Kajian Akademik agar lebih baik lagi, serta penyampaian pengesahan tim penyusun/pokja Rancangan Perkada UPTD persampahan yang telah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Keerom.

## METODE

Metode yang diterapkan untuk pencapaian maksud dan tujuan pada rapat Focus Group Discussion dalam kegiatan pendampingan Kelembagaan Penyusunan Kajian Akademik dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Persampahan Kabupaten Keerom ialah dengan Presentasi dan diskusi.

Narasumber utama pada sesi presentasi dan diskusi diwakili oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua, dan konsultan Daerah.

Topik yang disampaikan oleh masing-masing narasumber adalah :

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua “Pemaparan tentang pelaksanaan pendampingan di pusat (meliputi; *Kick Off Meeting*, Konsinyasi dan Workshop akhir, serta Pemaparan tentang pelaksanaan pendampingan di daerah (meliputi; *Technical Meeting*, FGD dan *Workshop* Daerah)”
2. Konsultan Daerah menjelaskan mengenai muatan-muatan dalam kajian Akademis yaitu pentingnya pembentukan UPTD, Analisis Beban Kerja, Analisis Rasio Belanja dan penjelasan pendampingan Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***PROSES RAPAT FOCUS GROUP DISCUSSION***

Dalam kegiatan pendampingan pembentukan UPTD Persampahan di Daerah maka Rapat Focus Group Discussion tahapan selanjutnya setelah rapat Technical Meeting. Rapat ini dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2022 dibuka oleh Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom guna mengawali jalannya kegiatan rapat dan pemaparan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua dan konsultan Pendamping Daerah.

Selanjutnya dilakukan pemaparan dari Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 BPPW Papua dengan membahas tentang :

1. Memberikan paparan tentang kebijakan sanitasi berdasarkan RPJMN 2020 – 2024
2. Pemaparan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan di pusat yang meliputi ; *Kick Off Meeting*, Konsinyasi dan Workshop akhir
3. Pemaparan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan dan proses pendampingan yang dilakukan di daerah yang meliputi meliputi; *Technical Meeting*, FGD dan *Workshop* Daerah.
4. Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan Kajian Akademis dan Pembahasan kajian Akademis dan Perkada UPTD persampahan kabupaten Keerom.

Tahap Ketiga dilakukan paparan dari Konsultan pendamping kegiatan Ranperkada bidang sanitasi, dengan membahas tentang :

1. Penjelasan mengenai Alur dan sistematika penyusunan kajian Akademis dan Perkada UPTD persampahan dengan mengacu pada standar yang ditetapkan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sanitasi.
2. Memberikan penjelasan muatan-muatan dalam penyusun Kajian Akademis dan Pembahasan kajian Akademis dan Perkada UPTD persampahan yang harus termuat baik data primer maupun sekunder.
3. Menyampaikan hal-hal teknis yang harus dipersiapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD 2) agar pembahasan saat kegiatan tersebut nantinya lebih focus pada pembahasan terhadap muatan ranperkada.

4. Menjelaskan pendampingan hukum dan pentingnya pembentukan UPTD agar pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan baik.

Tahap Keempat penutupan kegiatan Rapat Focus Group Discussion yang didahului dengan penandatanganan Berita Acara Rapat Focus Group Discussion penyusunan Kajian Akademis dan Pembahasan Rancangan Perkada UPTD persampahan.

Dalam kegiatan Rapat Focus Group Discussion 1 Pendampingan penyusunan Kajian Akademis dan Pembahasan kajian Akademis dan Perkada UPTD persampahan yang menjadi Narasumber yaitu ;

1. Erwin Sucipto, ST, M.Si Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 BPPW Papua
2. Alberth E S Abrauw, ST.,M.Sc selaku Tenaga Ahli Lingkungan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua
3. Hendrik Vallen Ayomi selaku Tenaga Ahli Kelembagaan pada pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua
4. Tom Alfa Reumi selaku Tenaga Ahli Hukum pada pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua

### ***Presentasi dan Diskusi***

Presentasi dan diskusi dilaksanakan dari penyaji materi yakni oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua memaparkan materi tentang pelaksanaan pendampingan di pusat (meliputi; Kick Off Meeting, Konsinyasi dan Workshop akhir, serta Pemaparan tentang pelaksanaan pendampingan di daerah (meliputi; Technical Meeting, FGD dan Workshop Daerah)”. Dari Konsultan Daerah memaparkan materi tentang muatan-muatan yang dicantumkan dalam kajian Akademis dan Perkada UPTD persampahan dan Penyampaian mengenai pentingnya pembentukan UPTD. Bahan materi yang disajikan oleh para pemateri dapat dilihat pada lampiran.

### ***Catatan Penting Hasil Presentasi Dan Diskusi***

Berdasarkan seluruh pembahasanan yang dipresentasikan dan hasil diskusi, proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Masukan untuk penulisan Kajian Akademik harus dilengkapi dengan daftar hadir dan daftar isi
2. Untuk data yang belum terpenuhi perlu akan dilengkapi oleh dinas terkait. Serta dinas-dinas terkait lebih proaktif lagi dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk melengkapi kajian akademik.
3. Masukan dari pusat agar dalam menyusun Analisis Rasio Belanja dan Analisis Beban Kerja perlu mengikuti atau merujuk pada aturan-aturan terbaru.
4. Dalam penyebutan dan penulisan jabatan dalam kajian akademik akan mengikuti nomenklatur yang ada di Pemerintah Kabupaten Keerom yang mana akan diperbaiki oleh bagian Organisasi Setda kabupaten Keerom.
5. Rapat *FGD 2* akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di Aula Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom.



## KESIMPULAN

Demikian prosiding Rapat Focus Group Discussion mengenai muatan-muatan dalam penyusunan dan Pembahasan kajian Akademis serta Perkada UPTD persampahan. Bahkan menerima daran masuk yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Akademis dan Rancangan Perkada juga disepakati bersama oleh setiap SKPD yang hadir pada saat rapat Focus Group Discussion mengenai kajian akademik pembentukan UPTD persampahan Kabupaten Keerom. Serta pembahasan tentang materi pelaksanaan pendampingan di pusat (meliputi; Kick Off Meeting, Konsinyasi dan Workshop akhir, serta Pemaparan tentang pelaksanaan pendampingan di daerah (meliputi; Technical Meeting, FGD dan Workshop Daerah. Kegiatan dilaksanakan pada hari pada hari 29 Juli 2022 bertempat di Aula Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom. Hasil pembahasan ini menjadi bagian dari tahapan pendampingan baik dengan pusat maupun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2020 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Keerom Tahun 2021-2025

# **KRIDA CENDEKIA**

**VOL 2 NO 1 APRIL 2023 - JULI 2023**

**E-ISSN 2797 006X**

Buku Panduan Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Sanitasi Kementerian PUPR Dirjen  
Cipta Karya Tahun 2021

Kebijakan strategis daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga dalam Keputusan  
Bupati Keerom nomor 71 Tahun 2018

Strategi Sanitasi Kabupaten Keerom tahun 2020-2024